

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang "hitam" (rentan) terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi dan kemungkinan tsunami. Potensi bencana disebabkan oleh lokasi Indonesia di titik pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yang juga dilintasi oleh busur vulkanik aktif (Cincin Api Pasifik), serta terjadinya ENSO (El-Nino Southern Oscillation) dan La Nina. Bencana dapat mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat dengan berbagai cara. Selain penyebab alami dan non-alami, faktor manusia juga dapat berperan dalam bagaimana bencana mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Dampak bencana meliputi korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan gangguan psikologis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Penyokong angka terbesar dalam penyebab kematian di dunia yaitu bencana alam. Siap siaga dan tetap berjaga-jaga harus dilakukan masyarakat terhadap setiap ancaman dari bencana yang akan dihadapi karena bencana dapat mendatangkan rugi pada masyarakat. Berdasarkan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2020) didapatkan bahwa kejadian bencana di dunia memberikan efek kerugian pada 97,6 juta jiwa penduduk dunia. Sebanyak 97%

yang terkena dampak diakibatkan oleh perubahan iklim dan cuaca. Berdasarkan kejadian bencana tersebut didapatkan sebanyak 24.396 jiwa meninggal (IFRC, 2020). Kejadian bencana di Indonesia berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.092 kejadian bencana alam pada tahun 2021. Efek dari bencana tersebut, didapatkan adanya korban jiwa yang meninggal yaitu sebanyak 789 jiwa, tidak ditemukan sebanyak 74 jiwa, luka-luka sebanyak 13.095 jiwa, dan sengsara sebanyak 4.346.559 jiwa (BNPB, 2021). Sedangkan, kejadian bencana alam sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 1.855 kejadian bencana alam di Indonesia (BNPB, 2022).

Salah satu provinsi di Indonesia, Sumatera Barat, memiliki jumlah kejadian bencana tertinggi kelima secara keseluruhan. Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak pada garis patahan, yang meningkatkan kemungkinan bencana. Selain itu, daerah yang paling berisiko tinggi terhadap bencana adalah Kota Padang (BNPB, 2018). Provinsi Sumatera Barat di Indonesia rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Sumatera Barat secara geologis berbasis dataran rendah, membentang dari pantai barat Samudra Hindia ke dataran tinggi. Gunung-gunung ini, yang meliputi Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Gunung Sagu, dan lainnya, dikelilingi oleh Bukit Barisan, pegunungan yang membentang dari laut ke tenggara dan memiliki aktivitas vulkanik aktif. Selain itu, Sumatera Barat terletak di Jalur Sesar Semangko, yang merupakan tempat bertemunya Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, sehingga rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Kondisi tersebut membuat wilayah ini dihadang oleh bencana alam yang hadir tiap tahunnya (BNPB, 2017).

Beberapa kelurahan, antara lain Pasie Nan Tigo, Parupuk Tabing, Batang Kabung Ganting, dan Lubuk Buaya, berada di wilayah Kecamatan Koto Tangah. Desa Pasie nan tigo meliputi 14,57 km² (1.457 ha) dan membentang 7,2 km dari laut. Terdapat dataran rendah dengan pantai yang lebarnya berkisar antara 2 hingga 21 meter, yang terdiri dari 14 RW dan 52 RT (Haryani, 2016). 2.000 Ha desa/kelurahan terancam banjir, 2.512.000 Ha desa/kelurahan terancam tsunami, dan 2.512.000 Ha desa/kelurahan terancam gempa, menurut data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI (Haryani, 2019).

Kesiapsiagaan masyarakat sangat penting mengingat peristiwa bencana yang telah terjadi dan dampaknya. Penanggulangan bencana tidak akan berjalan lancar jika hanya pemerintah yang terlibat dan bukan masyarakat. Bencana harus dihadapi oleh masyarakat agar dapat mempersiapkannya di masa depan. Tindakan antisipasif perlu dilakukan sebagai loncatan pengurangan risiko bencana berupaya dengan meningkatkan kesiapsiagaan masing-masing masyarakat. Kelompok rentan mengambil lebih banyak risiko bencana daripada kelompok masyarakat lainnya (Alam, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, anggota masyarakat yang rentan seperti bayi, anak kecil, ibu hamil atau menyusui, orang berkebutuhan khusus, dan lansia harus diprioritaskan saat terjadi bencana. Kelompok masyarakat yang berisiko tinggi mengalami bencana disebut sebagai kelompok rentan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi kurang akan kecakapan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana daripada kelompok masyarakat lainnya sehingga dampak yang dirasakan akan lebih besar (Siregar & Wibowo, 2019). Orang dengan lanjut usia menurut UU No.13

Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lansia adalah salah satu kelompok risiko, sebelum, selama dan setelah bencana. Lansia seiring bertambahnya usia, sehingga terjadi penurunan fungsi tubuh yang meliputi perubahan fisik, penurunan fungsi tubuh, gangguan pengetahuan, demensia, kelemahan, riwayat penyakit kronis dan kebutuhan khusus.

Orang dengan kebutuhan khusus merupakan kelompok memiliki risiko tinggi saat terjadinya bencana, hal ini dikarenakan terbatasnya kecakapan yang dimiliki dan terbatasnya akses terhadap lingkungan fisik, informasi dan komunikasi pada masyarakat. Sekitar 15% dari populasi dunia atau lebih dari satu miliar orang kebutuhan khusus (The World Bank, 2016). Lansia dengan kebutuhan khusus cenderung terpinggirkan dan tidak masuk dalam sistem yang mengakibatkan mereka terlewatkan dalam upaya penyelamatan dan evakuasi bencana.

Jenis orang dengan kebutuhan khusus diantaranya yaitu gangguan visual (penglihatan), gangguan pendengaran, gangguan mental, dan gangguan fisik dimana setiap yang kebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda-beda (Probosiswi, 2013). Berdasarkan data gangguan penglihatan pada tahun 2015, didapatkan bahwa sebanyak 253 juta orang mengalami gangguan penglihatan. Menurut temuan survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB), gangguan penglihatan mempengaruhi 1,7% hingga 4,4% populasi lansia Indonesia di atas usia 50 tahun. Ada 6,4 juta penyandang gangguan penglihatan di Indonesia. Di antara mereka, 5,1 juta orang memiliki gangguan penglihatan sedang hingga berat, dan 1,3 juta buta. 250 juta (4,2%) orang di

seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran atau tuli, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Riskesdas (2013), ada 2,6% orang dengan gangguan pendengaran dan 0,09% dari mereka yang tuli.

Meningkatnya populasi lanjut usia, maka meningkatkan jumlah orang dengan kebutuhan khusus yang diakibatkan meningkatnya masalah pada kesehatan akibat penyakit kronis dan degeneratif. Masalah fungsional yang menyebabkan kecacatan dan penurunan kualitas hidup orang tua dipengaruhi oleh gangguan penglihatan dan pendengaran. Lansia dengan kebutuhan khusus sering diabaikan dalam kesiapsiagaan dan pendaftaran darurat, dan mereka juga sering ditinggalkan dari inisiatif kesiapan dan respons darurat, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang bencana dan cara menghadapinya. Menurut Roland Hansen, populasi lansia dan berkebutuhan khusus biasanya merupakan mayoritas dari mereka yang terkena dampak bencana alam, baik selama maupun setelahnya (Malteser international, 2012). Menurut temuan Riskesdas 2018, 74,3% lansia mampu menyelesaikan tugas sehari-hari tanpa bantuan, sementara 22,0% menghadapi hambatan kecil, 1,1% menghadapi hambatan sedang, 1% menghadapi hambatan besar, dan 1,6% hambatan total.

Lansia dengan kebutuhan khusus butuh bantuan orang lain dalam penyelamatan diri sehingga membutuhkan orang terdekat agar merasakan keamanan. Keluarga akan merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan dan memahami lansia dengan kebutuhan khusus karena mereka lebih sadar akan kebutuhan mereka dalam keadaan tertentu. Orang lanjut usia dengan kebutuhan khusus harus menerima dukungan dan perawatan individual dari anggota

keluarga, terutama selama masa darurat (Sari, 2018). Keadaan tanggap darurat dapat diatasi keluarga dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dan membentuk kerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Salah satu persiapan melibatkan menyiapkan persediaan darurat, membuat pengaturan tambahan untuk evakuasi jika terjadi keadaan darurat, dan berbicara tentang kegiatan bantuan atau penyelamatan jika terjadi keadaan darurat (CINCH, 2011).

Orang dengan kebutuhan khusus memiliki aksesibilitas yang kurang karena perubahan lingkungan dan fasilitas yang tidak memadai akibat bencana. Orang-orang kebutuhan khusus dilaporkan menjadi korban bencana alam, baik menderita luka-luka atau meninggal dalam bencana dengan jumlah yang signifikan, seperti halnya wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, perencanaan inisiatif penanggulangan bencana yang didasarkan pada keterampilan mereka harus lebih memperhatikan risiko dan kebutuhan unik bagi orang-orang kebutuhan khusus. Penuaan, kondisi fisik, pendidikan, dan penurunan pendapatan yang besar terkait dengan persiapan disabilitas yang tidak memadai (Al-Rousan *et al*, 2015). Populasi lansia rentan dengan kebutuhan khusus sangat membutuhkan pertimbangan khusus selama kesiapsiagaan bencana. Peran keluarga dalam hal pengetahuan, sikap, dan tindakan yang diberikan oleh keluarga dalam melindungi lansia dapat membantu dalam kesiapan ini (Djafar, 2021). Lansia kebutuhan khusus dapat terhindar dari risiko bencana berkat keluarga yang siap menghadapi keadaan darurat, dan keluarga yang sudah siap akan mengurangi dampak bencana pada lansia.

Krisis bencana dapat ditangani secara efektif oleh pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu berkat upaya kesiapsiagaan yang bertujuan

meminimalkan kerugian dan korban jiwa. Strategi manajemen bencana dapat dibuat, sumber daya dapat dipertahankan, dan staf dapat dilatih sebagai langkah-langkah kesiapsiagaan. Gagasan kesiapan sangat membantu untuk memahami kapasitas untuk segera dan tepat menanggapi krisis bencana (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Menurut BNPB (2018), persiapan sangat penting karena dapat mengurangi atau menghilangkan dampak bencana. Hal ini terbukti ketika membandingkan jumlah korban jiwa akibat tragedi gempa bumi di Kumamoto, Jepang, dengan jumlah kematian terkait gempa di Indonesia. Jumlah korban jiwa dari gempa berkekuatan 7,3 skala Richter di Jepang, setidaknya sejauh ini, sangat minim. Ini karena masyarakat Jepang memiliki budaya kesiapsiagaan yang lebih kuat terhadap gempa bumi. Perhatian lebih juga diberikan pemerintah di Jepang demi keselamatan rakyatnya dari bahaya gempa bumi. Pemerintah Jepang memutuskan terkait kesiapsiagaan gempa bumi di negaranya perlu ditinjau kembali (Naoto, 2018). Kesiapsiagaan keluarga merupakan salah satu kesiapsiagaan sebagai upaya dari dampak gempa bumi di Jepang. Kesiapan keluarga tidak dapat sepenuhnya mencegah korban jiwa. Namun, setidaknya dapat mengurangi jumlah kematian dan kerugian finansial.

Kesiapsiagaan keluarga khususnya pada lansia dengan kebutuhan khusus sangat penting. Berdasarkan penelitian Susanti (2020) didapatkan bahwa kesiapsiagaan keluarga dengan berkebutuhan khusus didapatkan sebanyak 58,1% tergolong baik, sebanyak 35,5% tergolong cukup dan sebanyak 6,5% masih tergolong kurang. Sedangkan, berdasarkan penelitian Putri (2020) didapatkan bahwa sebanyak 43,4% keluarga memiliki rencana tanggap darurat

kategori kurang siap. Agar keluarga cukup dan siap menghadapi bencana, persiapan yang baik dalam keluarga dapat mengurangi risiko bencana.

Pentingnya pemahaman risiko bencana oleh masyarakat terutama keluarga berkaitan dengan meningkatnya potensi jumlah masyarakat terpapar ancaman akan bencana sehingga tahu cara akan berespon dalam menghadapi situasi darurat. Langkah-langkah kesiapsiagaan bencana dalam rumah tangga dengan kelompok rentan harus mencakup pengetahuan tentang tanggap bencana, mitigasi, dan pemulihan (BNPB, 2018). Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan kegiatan untuk meminimalisir risiko bencana tanpa mengabaikan kebutuhan kelompok rentan tersebut, pengelolaan risiko bencana pada kelompok rentan dilakukan dengan melakukan penilaian kebutuhan yang lebih menyeluruh.

Orang berusia di atas 60 tahun memiliki angka kematian tertinggi selama tsunami Aceh pada tahun 2004. (Bayraktar & Dal Yilmaz, 2018). Studi ini menunjukkan meningkatnya kerentanan lansia terhadap viktimisasi terkait bencana. Menurut data BNPB gempa bumi Sumatera Barat 7,6 tahun 2009, hingga 80% pasien di RSUD Pariaman adalah lansia. Perlunya memasukkan kesiapan kelompok rentan senior ke dalam dampak mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan pengalaman bencana dalam dengan korban lansia cukup besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengembangkan aturan yang secara tegas menangani tanggap darurat bagi lansia saat menghadapi bencana sebelum, selama, atau setelah bencana, terutama bagi lansia dengan persyaratan khusus (Rahmadina & Susanti, 2019).

Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022 di RW 01 Kelurahan Pasie Nan Tigo, didapatkan bahwa risiko bencana tertinggi

adalah gempa bumi, tsunami, dan badai. Hal ini dikarenakan RW 01 Kelurahan Pasie Nan Tigo, berada didekat pesisir pantai. Pada saat survey dilakukan didapatkan sebanyak 4 orang lansia dengan kebutuhan khusus di RW 01 di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Jenis kebutuhan khusus pada lansia adalah lansia dengan gangguan sensorik, yaitu gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan (visual).

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa orang tua mengklaim bahwa, jika terjadi bencana, mereka hanya bisa menyerah karena mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Lansia mengatakan tidak bisa mengikuti kegiatan karena keterbatasan kondisi fisik. Keluarga lansia mengatakan saat ini belum ada persiapan terkait menghadapi bencana yang akan terjadi, keluarga mengatakan saat ini hanya memisahkan dokumen-dokumen penting disatu tempat. Kesiapsiagaan pada keluarga yang memiliki lansia dengan kebutuhan khusus sangat penting. Hal ini dapat diamati dari pengetahuan keluarga, namun juga dapat dilihat dari sikap dan tindakan keluarga dengan anggota lansia yang membutuhkan perawatan khusus ketika bencana melanda setiap saat. Untuk lebih memahami bagaimana keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana dan menanggapi di RW 01 Desa Pasie Nan Tigo, para peneliti percaya bahwa deskripsi yang lebih dalam diperlukan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah untuk penelitian ini berdasarkan informasi latar belakang yang dijelaskan di atas adalah “Bagaimana kesiapsiagaan keluarga

untuk rencana tanggap darurat pada lansia dengan kebutuhan khusus dalam menghadapi bencana alam di RW 01 Kelurahan Pasie Nan Tigo?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum untuk penelitian ini adalah memperoleh gambaran terkait studi kesiapsiagaan keluarga untuk rencana keadaan darurat pada lansia dengan kebutuhan khusus terhadap bencana alam di RW 01 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dalam mengembangkan pendidikan bencana terutama dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan lansia dengan kebutuhan khusus ketika menghadapi bencana alam.

2. Bagi Keluarga dengan Lansia Berkebutuhan Khusus

Penelitian ini diharapkan sebagai ilmu dasar bagi keluarga dengan lansia berkebutuhan khusus dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Temuan studi ini kemungkinan akan dibandingkan dengan studi lain tentang kesiapsiagaan bencana oleh peneliti selanjutnya di masa depan.